

Stratifikasi Sosial dalam Institusi Keagamaan Hindu Bali: Pelestarian Budaya atau Ketimpangan Sosial?

Novi Dwi Lestari¹, Binti Maunah^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Corresponding author, e-mail: novidwilestari758@gmail.com.

Abstrak

Stratifikasi sosial dalam masyarakat Hindu Bali merupakan fenomena yang memiliki kaitan erat dengan sistem keagamaan dan adat, khususnya melalui institusi pura dan desa pakraman. Dalam banyak kajian, institusi keagamaan cenderung dipahami sebagai ruang normatif pelestarian budaya dan harmoni sosial, sehingga peran dalam mengelola relasi hierarkis kurang dianalisis secara kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana stratifikasi sosial berbasis wangsa dilegitimasi, dipertahankan, dan dinegosiasikan melalui institusi keagamaan Hindu Bali di tengah dinamika modernisasi dan perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan metode studi pustaka terkait artikel jurnal dan buku akademik yang relevan dengan kajian stratifikasi sosial dan sosiologi agama. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan menafsirkan praktik ritual, kepemimpinan adat, dan distribusi peran keagamaan dalam kerangka relasi kuasa simbolik. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem stratifikasi berbasis kasta masih berfungsi sebagai fondasi penting dalam pengorganisasian keagamaan, dimana kelompok Brahmana dapat memegang otoritas ritual utama, sementara kelompok Sudra lebih banyak berperan dalam fungsi teknis keagamaan. Namun demikian, dinamika kontemporer memperlihatkan adanya negosiasi simbolik yang dipengaruhi oleh pendidikan, mobilitas sosial, dan keterlibatan generasi muda, meskipun perubahan tersebut belum menghasilkan transformasi struktural yang signifikan. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa institusi keagamaan Hindu Bali berfungsi secara ambivalen, yakni sebagai sarana pelestarian budaya sekaligus mekanisme reproduksi ketimpangan simbolik, sehingga diperlukan ruang refleksi dan dialog agar pelestarian tradisi dapat berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan partisipasi yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Hindu Bali; Institusi keagamaan; Modernisasi kasta; Stratifikasi sosial.

Abstract

Social stratification in Balinese Hindu society is a phenomenon closely linked to the religious and customary systems, particularly through the institutions of pura (temple) and desa pakraman (traditional village). In many studies, religious institutions tend to be understood as normative spaces for cultural preservation and social harmony, so that their role in managing hierarchical relations is less critically analyzed. This study aims to analyze how clan-based social stratification is legitimized, maintained, and negotiated through Balinese Hindu religious institutions amid the dynamics of modernization and social change. This study uses a descriptive-analytical qualitative approach using a literature review method related to journal articles and academic books relevant to the study of social stratification and the sociology of religion. The data were analyzed using content analysis techniques by interpreting ritual practices, traditional leadership, and the distribution of religious roles within the framework of symbolic power relations. The results of the analysis show that the caste-based stratification system still functions as an important foundation in religious organization, where the Brahmana group holds primary ritual authority, while the Sudra group plays a greater role in technical religious functions. However, contemporary dynamics show that there is symbolic negotiation influenced by education, social mobility, and the involvement of the younger generation, although these changes have not yet resulted in significant structural transformation. This study concludes that Balinese Hindu religious institutions function ambivalently, as both a means of cultural preservation and a mechanism for reproducing symbolic inequality. Therefore, a space for reflection and dialogue is needed so that the preservation of tradition can go hand in hand with the principles of social justice and more inclusive participation.

Keywords: Balinese Hinduism; Caste; Modernization religious institutions; Social stratification.

How to Cite: Lestari, N. D. & Maunah, B. (2025). Stratifikasi Sosial dalam Institusi Keagamaan Hindu Bali: Pelestarian Budaya atau Ketimpangan Sosial?. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 12(2), 113-124.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2025 by Jurnal Socius.

Pendahuluan

Stratifikasi sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam masyarakat yang memiliki sistem agama dan adat yang kuat. Dalam konteks kehidupan masyarakat Bali yang mayoritas penduduk memeluk agama Hindu, stratifikasi sosial tidak hanya beroperasi pada ranah ekonomi dan politik, tetapi juga terintegrasi secara mendalam dalam sistem keagamaan dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun (Geertz, 1980; Picard, 2006). Agama, adat, dan struktur sosial di Bali membentuk relasi yang saling menguatkan, sehingga institusi keagamaan tidak hanya semata berfungsi sebagai ruang spiritual, melainkan juga sebagai arena regulasi sosial dan distribusi kekuasaan simbolik (Geertz, 1983; Lansing, 1991).

Secara empiris, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa hierarki sosial berbasis keturunan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Bali kontemporer, terutama dalam konteks ritual keagamaan, kepemimpinan adat, dan relasi sosial sehari-hari (Segara & Kuckreja, 2024). Studi lain juga menegaskan bahwa sistem *catur kasta* dalam praktik sosial Hindu Bali masih memunculkan ketimpangan simbolik dalam akses terhadap peran sosial dan religius (Purana, 2022). Penelitian lain mengenai generasi muda juga menunjukkan adanya ambivalensi antara penerimaan nilai kesetaraan sosial modern dan keberlanjutan norma hierarkis adat, khususnya dalam isu perkawinan, partisipasi keagamaan, dan legitimasi simbolik (Maulana & Putra, 2021; Subawa, 2022a; Suryani & Sugianingrat, 2021). Dengan adanya hal ini, mengindikasikan bahwa modernisasi tidak serta-merta menghapus struktur stratifikasi, melainkan memunculkan proses negosiasi sosial yang kompleks di dalam institusi keagamaan dan adat.

Secara historis, masyarakat Bali mengenal sistem stratifikasi yang sering dipahami melalui konsep *wangsa* atau *wangsa*. Dalam ajaran Hindu, *wangsa* dipahami sebagai pembagian fungsional berdasarkan kualitas (*guna*) dan kerja (*karma*). Namun dalam praktik lokal Bali, konsep tersebut mengalami transformasi menjadi struktur hierarki sosial yang relatif tertutup dan diwariskan secara genealogis (Howe, 2004; Wiana & Santeri, 1993). Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa transformasi ini terus dilakukan melalui mekanisme adat dan institusi sosial keagamaan (Sihombing, 2022). Proses historis turut berperan dalam mengukuhkan stratifikasi berbasis *wangsa* sebagai bagian dari tatanan sosial dan religion masyarakat Bali seperti Majapahitisasi sejak abad ke-14, kolonialisme Belanda, serta institusionalisasi (Nordholt, 2009; Robinson, 2009).

Dalam praktik keseharian, stratifikasi sosial terbukti secara nyata melalui penyelenggaraan ritual keagamaan, struktur kepemimpinan desa adat, pembagian peran religius, serta penggunaan bahasa Bali yang bertingkat (*alus-madya-kasar*) sebagai mekanisme kultural tempat mereproduksi relasi hierarkis secara simbolik (Eiseman, 1990; Hobart, 2022). Studi mutakhir juga menunjukkan bahwa posisi rohaniawan Hindu (*sulinggih*) tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga terkait dengan status sosial dan legitimasi ekonomi dalam masyarakat Bali kontemporer (Ayuningsasi & Sukadana, 2022). Akses terhadap peran sebagai *sulinggih*, *pemangku*, maupun pengurus lembaga adat tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan kerap dipengaruhi oleh latar belakang *wangsa*, senioritas genealogis, serta legitimasi adat yang telah mengakar (MacRae, 2010; Vickers, 2012). Dengan demikian, institusi keagamaan memiliki dua fungsi, sebagai ruang religius dan sebagai struktur sosial yang mengatur distribusi otoritas simbolik. Dalam penelitian ini, institusi keagamaan dipahami secara operasional mencakup pura, desa adat, serta organisasi dan aktor keagamaan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan ritual, distribusi peran religius, dan produksi legitimasi simbolik.

Kajian akademik mengenai masyarakat Bali telah berkembang luas dengan beragam pendekatan. Studi-studi klasik dalam antropologi dan sosiologi agama menekankan dimensi simbolik, ritualistik, dan kosmologis agama Hindu Bali sebagai mekanisme integrasi sosial dan pembentuk kohesi komunal (Geertz, 1980, 1983; Lansing, 1991). Kajian ini memberikan fondasi penting dalam memahami agama sebagai sistem makna yang menstabilkan tatanan sosial. Selanjutnya, pendekatan historis dan politik mengaitkan struktur sosial Bali dengan dinamika kolonialisme, pembentukan negara, dan politik modern (Nordholt, 2009; Robinson, 2009).

Pergeseran fokus pada isu identitas, perubahan sosial, dan negosiasi adat dalam masyarakat Bali kontemporer sudah mulai menjadi topik dalam penelitian. Parker (2003b) dan MacRae (2010) juga menunjukkan bagaimana adat dan agama beradaptasi terhadap modernitas dan perubahan sosial. Segara & Kuckreja (2024) secara khusus menegaskan bahwa stratifikasi sosial merupakan fondasi penting dalam pembentukan identitas Bali modern. Penelitian lain menunjukkan bahwa perubahan sikap terhadap sistem kasta juga tampak dalam praktik perkawinan lintas *wangsa* dan relasi sosial urban di Bali (Subawa, 2024; Yogiswari, Maharani, & Nugroho, 2025). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan institusi keagamaan sebagai konteks normatif atau latar budaya, bukan sebagai *locus* utama analisis relasi kuasa dan reproduksi stratifikasi sosial.

Agama dan adat sering dipahami sebagai fondasi harmoni sosial dalam masyarakat Bali. Meski demikian, kajian sosiologis menunjukkan bahwa institusi keagamaan juga berfungsi sebagai struktur sosial yang mengatur distribusi otoritas, legitimasi, dan status simbolik. Dalam konteks Hindu Bali, relasi antara agama, adat, dan struktur sosial membentuk tatanan yang relatif stabil, namun tidak sepenuhnya netral secara sosial. Pertanyaan kunci mengenai sejauh mana institusi keagamaan tidak hanya merefleksikan stratifikasi sosial yang ada, tetapi juga secara aktif berperan dalam mereproduksi dan melegitimasi hierarki melalui praktik ritual, kepemimpinan adat, dan pengelolaan otoritas religius masih belum banyak dieksplorasi secara sistematis.

Berdasarkan pada pemetaan literatur tersebut, terdapat celah penelitian yang signifikan. Pertama, kajian tentang Hindu Bali masih dominan melihat institusi keagamaan sebagai agen integrasi dan pelestarian budaya, sementara perannya sebagai mekanisme reproduksi stratifikasi sosial belum dianalisis secara sistematis. Kedua, relasi kuasa dalam praktik keagamaan sehari-hari seperti distribusi otoritas ritual, legitimasi kepemimpinan adat, dan akses terhadap simbol-simbol religius masih sering diperlakukan sebagai aspek normatif dan *taken for granted*, bukan sebagai fenomena sosiologis yang problematis (Bourdieu, 1977; Parker, 2003a). Penelitian lintas agama di Bali menunjukkan bahwa struktur stratifikasi berbasis kasta turut memengaruhi komunitas non-Hindu melalui relasi sosial dan simbolik yang lebih luas (Dewi, Priastana, & Priyono, 2024). Akibatnya, ketimpangan simbolik dan struktural dalam institusi keagamaan cenderung tersamarkan oleh narasi harmoni, gotong royong, dan *menyama braya*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memposisikan institusi keagamaan Hindu Bali secara eksplisit sebagai arena kontestasi sosial dan simbolik. Penelitian ini menganalisis bagaimana stratifikasi sosial dilegitimasi, dijalankan, dinegosiasikan, dan mulai dipertanyakan melalui praktik institusional keagamaan di tengah proses modernisasi, demokratisasi, dan globalisasi. Dengan demikian, studi ini juga berkontribusi pada perdebatan sosiologis yang lebih luas mengenai peran institusi keagamaan dalam mempertahankan atau menantang ketimpangan sosial di masyarakat pascakolonial dan multikultural. Fokus dan tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk, mekanisme, dan implikasi stratifikasi sosial dalam institusi keagamaan Hindu Bali, serta bagaimana struktur tersebut berfungsi ganda sebagai alat pelestarian budaya sekaligus sebagai sumber potensi ketimpangan sosial. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami dinamika kekuasaan dalam lembaga keagamaan tradisional di tengah meningkatnya tuntutan keadilan sosial, kesetaraan hak, dan partisipasi inklusif, terutama dari generasi muda dan kelompok marginal. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi karakteristik stratifikasi sosial dalam institusi keagamaan Hindu Bali; menganalisis peran institusi keagamaan dalam mereproduksi dan/atau mentransformasi struktur sosial; serta memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan sosiologi agama dalam memahami relasi antara agama, kekuasaan, dan perubahan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis stratifikasi sosial dalam institusi keagamaan Hindu Bali sebagai fenomena yang berkaitan dengan relasi kuasa, legitimasi simbolik, dan reproduksi struktur sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, praktik, serta dinamika institusional agama dan adat secara kontekstual dalam masyarakat yang memiliki sistem simbolik dan hierarki sosial yang kuat (Geertz, 1983; Moleong, 2017). Metode deskriptif-analitis digunakan tidak hanya untuk menggambarkan struktur stratifikasi sosial yang ada, tetapi juga menafsirkan bagaimana struktur tersebut dilegitimasi, dipertahankan, dan dinegosiasikan melalui praktik keagamaan dan adat dalam masyarakat Bali.

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur terhadap buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan kajian stratifikasi sosial, sosiologi agama, dan masyarakat Bali. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan seleksi sumber berdasarkan relevansi teoretis dan empiris; identifikasi tema utama yang berkaitan dengan otoritas ritual, hierarki sosial, legitimasi institusional, dan reproduksi simbolik; serta penafsiran tema secara

analitis menggunakan teori stratifikasi sosial dan teori juga sosiologi agama. Kerangka dalam analisis ini merujuk pada perspektif agama sebagai institusi sosial yang berperan dalam pembentukan dan reproduksi kekuasaan simbolik (Abdulsyani, 2004; Bourdieu, 1977) serta agama sebagai sistem makna yang menstrukturkan tatanan sosial (Geertz, 1983). Kerangka teoritik ini digunakan secara konsisten dalam pembahasan untuk menjelaskan bagaimana institusi keagamaan Hindu Bali berfungsi sebagai arena sosial yang berperan ganda, sebagai sarana pelestarian budaya sekaligus mekanisme diferensiasi dan ketimpangan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Sosial dalam Institusi Keagamaan Hindu Bali

Struktur sosial memiliki peran penting dalam membentuk praktik dan kelembagaan keagamaan masyarakat Hindu Bali. Institusi keagamaan seperti pura dan desa adat tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai arena sosial yang merefleksikan dan mereproduksi tatanan sosial yang telah mengakar. Praktik ritual, kepemimpinan keagamaan, serta pola partisipasi umat dijalankan dalam kerangka struktur sosial tertentu yang dilegitimasi secara religius dan adat. Dalam masyarakat Hindu Bali, sistem stratifikasi berbasis wangsa atau kasta menjadi fondasi utama dalam pembagian peran dan otoritas keagamaan. Meskipun dinamika sosial modern membuka ruang negosiasi terbatas, struktur tersebut masih relatif bertahan dalam praktik institusional keagamaan. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada sistem kasta sebagai dasar stratifikasi sosial serta peran institusi keagamaan dalam mempertahankan struktur sosial dalam kehidupan keagamaan masyarakat Hindu Bali.

Sistem Kasta sebagai Fondasi Stratifikasi Sosial

Bagian ini menyajikan hasil sintesis dan analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah mutakhir yang membahas stratifikasi sosial, sistem kasta, dan institusi keagamaan Hindu Bali (Segara & Kuckreja, 2024; Sihombing, 2022). Data sekunder tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta karakteristik utama struktur sosial keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Hindu Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur sosial dalam institusi keagamaan Hindu Bali masih sangat dipengaruhi sistem kasta (*varna*) yang berfungsi sebagai kerangka utama dalam pembagian peran dan otoritas religius (Purana, 2022; Sadnyini & Gorda, 2021). Pembagian Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra tidak hanya hadir sebagai klasifikasi sosial normatif, tetapi terwujud nyata dalam praktik ritual dan kelembagaan adat.

Dalam konteks institusi keagamaan seperti Pura dan Desa Pakraman, peran kepemimpinan ritual secara dominan masih dijalankan oleh kelompok Brahmana (Segara & Kuckreja, 2024) yang berfungsi sebagai pemimpin upacara dan penafsir utama dalam ajaran keagamaan, sehingga memiliki otoritas simbolik yang tinggi dan menempatkan mereka sebagai aktor sentral dalam pengendalian pelaksanaan ritual. Kelompok Ksatria dan Waisya juga menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam struktur sosial keagamaan Hindu Bali, terutama dalam kepemimpinan adat dan dukungan ekonomi terhadap kegiatan ritual (Ayuningsasi & Sukadana, 2022; Sihombing, 2022). Namun, keterlibatan tersebut tidak secara otomatis memberikan akses yang setara terhadap otoritas ritual inti yang tetap terpusat pada kelompok tertentu. Kelompok Sudra, yang secara demografis merupakan mayoritas dalam masyarakat Bali, memiliki peran utama dalam pelaksanaan teknis ritual dan berbagai kegiatan pendukung keagamaan (Purana, 2022). Akses mereka terhadap posisi strategis dalam pengambilan keputusan adat dan keagamaan relatif terbatas, sehingga terlihat adanya hierarki peran yang konsisten dalam praktik keagamaan sehari-hari. Pelaksanaan ritual keagamaan yang bersifat rutin dan berulang, seperti Ngaben, Galungan, dan Kuningan, menjadi sarana utama dalam berjalannya internalisasi struktur sosial.

Dalam ritual-ritual yang diadakan, setiap kelompok sosial menjalankan tugas yang relatif konsisten, mulai dari persiapan sarana upacara, pengaturan tempat, penyelenggaraan prosesi, hingga pelaksanaan doa dan mantra sesuai dengan peran yang dilekatkan pada masing-masing kelompok sosial (Purana, 2022; Sadnyini & Gorda, 2021). Kelompok yang memiliki otoritas ritual umumnya bertanggung jawab memimpin jalannya upacara, menentukan tata urutan prosesi, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan ritual dengan ketentuan agama dan adat setempat, sedangkan kelompok lainnya lebih banyak terlibat dalam aktivitas pendukung seperti pembuatan banten, pengaturan logistik, kegiatan ngayah, dan pemeliharaan kelancaran acara. Pola pembagian tugas seperti ini tidak hanya terlihat dalam upacara besar, tetapi juga dalam kegiatan rutin desa adat, seperti rapat persiapan upacara, pembagian jadwal ngayah, serta penugasan kepanitiaan ritual yang mengikuti struktur peran yang telah mapan (Segara & Kuckreja, 2024; Sihombing, 2022). Konsistensi pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa sistem kasta berfungsi sebagai fondasi praktis dalam pengorganisasian partisipasi sosial-keagamaan warga dan dipraktikkan sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang religius dan dianggap wajar oleh masyarakat (Sadnyini & Gorda, 2021).

Peran Institusi Keagamaan dalam Mempertahankan Struktur Sosial

Berdasar pada telaah sistematis terhadap penelitian terdahulu mengenai masyarakat Hindu Bali, ditemukan bahwa institusi keagamaan terutama Pura dan lembaga adat (desa adat/desa pakraman) memiliki peran signifikan dalam mempertahankan struktur sosial berbasis *wangsa* dalam praktik kehidupan keagamaan dan sosial sehari-hari. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Pura tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengorganisasian sosial yang merefleksikan hierarki sosial masyarakat Bali. Dalam konteks ritual keagamaan seperti Odalan, Galungan, dan Kuningan, pembagian peran ritual masih memperlihatkan diferensiasi berdasarkan latar belakang keturunan dan legitimasi adat tertentu (Eiseman, 1990; MacRae, 2010; Segara & Kuckreja, 2024). Akses terhadap peran religius yang dianggap *prestisius* seperti *sulinggih*, pemangku utama, atau pengurus inti pura dilaporkan lebih mudah diperoleh oleh kelompok *wangsa* tertentu, meskipun tidak selalu dinyatakan secara formal.

Penelitian lain menegaskan bahwa lembaga adat, khususnya desa pakraman, turut berperan sebagai mekanisme regulasi sosial yang mengintegrasikan norma keagamaan dan adat dalam struktur kehidupan warga. Melalui *awig-awig* dan *pararem*, desa adat mengatur kewajiban ritual, partisipasi upacara, serta distribusi tugas keagamaan yang praktiknya sering kali mengikuti pola hierarkis lama (Howe, 2004; Sihombing, 2022; Suadnyana, 2020). Struktur ini berfungsi dalam menjaga keteraturan sosial, namun sekaligus mereproduksi perbedaan status simbolik antarwarga.

Dalam penelitian mutakhir terlihat adanya dinamika negosiasi dalam praktik institusi keagamaan. Studi tentang generasi muda dan masyarakat urban Bali memperlihatkan peningkatan sikap kritis terhadap eksklusivitas peran berbasis *wangsa*, terutama dalam konteks pendidikan keagamaan, partisipasi organisasi, dan kepemimpinan adat (Maulana & Putra, 2021; Subawa, 2022b; Yogiswari et al., 2025). Namun, negosiasi ini cenderung berlangsung secara gradual dan simbolik, tanpa secara langsung membongkar struktur dasar stratifikasi sosial yang telah mengakar. Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pola temuan penelitian terdahulu terkait peran institusi keagamaan dalam struktur sosial Hindu Bali, sintesis hasil kajian literatur tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Temuan Penelitian Terdahulu tentang Peran Institusi Keagamaan dalam Struktur Sosial Hindu Bali

Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Institusi Keagamaan	Temuan Utama terkait Struktur Sosial
Eiseman (1990)	Ritual dan hierarki sosial Bali	Pura	Ritual keagamaan merefleksikan pembagian peran hierarkis berbasis status sosial
Howe (2004)	Hindu Bali dan struktur sosial	Desa adat	Norma adat dan agama berkontribusi pada reproduksi hierarki sosial
MacRae (2010)	Perubahan dan agensi dalam ritual	Pura	Akses peran ritual tidak sepenuhnya egaliter dan dipengaruhi legitimasi adat
Sihombing (2022)	Reproduksi kasta melalui adat	Desa Pakraman	<i>Awig-awig</i> dan <i>pararem</i> memperkuat diferensiasi status simbolik
Suadnyana (2020)	Fungsi desa pakraman	Desa Pakraman	Lembaga adat mengintegrasikan norma agama dan sosial dalam kehidupan warga
Segara & Kuckreja (2024)	Identitas dan stratifikasi Bali modern	Pura dan adat	Stratifikasi tetap signifikan dalam praktik keagamaan kontemporer
Maulana & Putra (2021)	Generasi muda dan kasta	Organisasi keagamaan	Muncul sikap kritis terhadap eksklusivitas peran berbasis <i>wangsa</i>
Subawa (2022)	Negosiasi adat oleh kaum muda	Institusi adat	Terjadi negosiasi simbolik tanpa pembongkaran struktur dasar
Yogiswari et al. (2025)	Perkawinan lintas <i>wangsa</i>	Komunitas keagamaan	Modernisasi mendorong adaptasi norma tanpa menghapus hierarki

Sumber: Peneliti

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu sepakat menempatkan pura dan desa pakraman sebagai institusi kunci dalam pengorganisasian kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Hindu Bali. Temuan tersebut secara konsisten memperlihatkan bahwa praktik ritual, pembagian peran keagamaan, serta regulasi adat melalui *awig-awig* dan *pararem* turut berfungsi dalam mempertahankan diferensiasi status

sosial yang telah mapan. Beberapa studi mutakhir mengidentifikasi muncul adanya ruang negosiasi, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat urban. Negosiasi yang terjadi masih cenderung bersifat simbolik dan gradual, serta belum menghasilkan perubahan struktural yang signifikan terhadap sistem stratifikasi berbasis *wangsa*. Kajian ini menunjukkan bahwa institusi keagamaan Hindu Bali menjalankan fungsi ganda yang bersifat ambivalen dan hal ini memungkinkan terjadinya negosiasi simbolik, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat urban, namun tanpa secara langsung membongkar struktur stratifikasi yang telah mengakar. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa institusi keagamaan Hindu Bali berfungsi ganda, sebagai mekanisme pelestarian struktur sosial, sekaligus ruang adaptasi terbatas terhadap perubahan sosial.

Dalam kerangka analitis yang lebih luas, keseluruhan temuan tersebut mengindikasikan bahwa institusi keagamaan Hindu Bali beroperasi sebagai arena sosial yang secara aktif mengelola keteraturan dan legitimasi melalui praktik ritual dan otoritas simbolik. Pura dan desa adat dapat dipahami sebagai bagian dari suatu medan religius yang mengatur akses terhadap peran, kewajiban, dan pengakuan sosial, sehingga struktur sosial berbasis *wangsa* dijalankan melalui mekanisme yang dilegitimasi secara religius dan kultural (Bourdieu, 1991). Dari perspektif teori ritual, pembagian peran keagamaan tidak bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai mekanisme simbolik yang menstrukturkan partisipasi sosial serta menegaskan posisi-posisi sosial tertentu dalam kerangka keteraturan kolektif (Bell, 1992; Turner, 1969). Keberlanjutan pola-pola tersebut juga dapat dibaca dalam konteks pascakolonial, di mana institusi agama dan adat memainkan peran penting dalam menaturalisasi struktur sosial sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya, meskipun mengalami adaptasi terbatas terhadap perubahan sosial yang lebih luas (Chatterjee, 1993; Comaroff & Comaroff, 1991; Dirks, 2001). Dalam konteks modernitas dan meningkatnya reflektivitas sosial, terutama melalui pendidikan dan mobilitas sosial, mulai terlihat adanya pergeseran cara individu memaknai otoritas dan partisipasi keagamaan, meskipun perubahan tersebut belum terartikulasikan sebagai transformasi struktural yang eksplisit (Appadurai, 1996; Archer, 2007; Giddens, 1991). Dengan demikian, institusi keagamaan Hindu Bali dapat dipahami sebagai ruang di mana keteraturan sosial dipertahankan sekaligus dinegosiasikan secara terbatas, sehingga menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana struktur sosial dan relasi kuasa terus beroperasi dalam kehidupan keagamaan masyarakat Bali.

Aktualisasi Varnāśrama Dharma dalam Kehidupan Sosial

Bagian ini menyajikan temuan-temuan empiris dari penelitian terdahulu yang relevan dan mutakhir mengenai stratifikasi sosial dalam masyarakat Hindu Bali, khususnya yang berkaitan dengan sistem *varna*/kasta dan implikasinya dalam kehidupan sosial-keagamaan. Data yang disajikan merupakan hasil sintesis dari sejumlah penelitian akademik yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi dan dapat diakses secara terbuka. Penyajian data dalam bentuk tabel dimaksudkan untuk memperlihatkan pola umum, kecenderungan, serta konsistensi temuan lintas studi yang menjadi dasar analisis lebih lanjut pada bagian pembahasan.

Tabel 2. Temuan Terkait Stratifikasi Sosial dan Sistem Kasta di Bali

Aspek Temuan	Penelitian/Sumber	Temuan Utama
Stratifikasi sosial dalam masyarakat Bali	Segara & Kuckreja (2024)	Sistem stratifikasi sosial Bali masih kuat secara historis dan kultural, berakar pada adat, sistem patrilineal, serta relasi sosial yang dipengaruhi oleh institusi keagamaan Hindu.
Hubungan <i>varna</i> dan sistem kasta	Purana (2022)	Konsep <i>varna</i> dalam praktik masyarakat Bali mengalami pergeseran menjadi sistem kasta berbasis keturunan yang memengaruhi status sosial dan relasi antarkelompok.
Persepsi generasi muda terhadap <i>varna</i> /kasta	Sintia (2025)	Generasi muda Hindu Bali menunjukkan pemahaman yang beragam dan cenderung kritis terhadap praktik kasta, serta mulai membedakan antara ajaran <i>varna</i> normatif dan realitas sosial.
Persepsi masyarakat terhadap sistem kasta	Dasrana, dkk. (2015)	Sistem kasta masih dipandang sebagai bagian dari struktur sosial desa adat dan berpengaruh terhadap peran sosial, meskipun terjadi perubahan nilai secara gradual.

Sumber: Peneliti

Pada data Tabel 2 menunjukkan bahwa stratifikasi sosial dalam masyarakat Hindu Bali merupakan fenomena yang bersifat struktural, historis, dan berkelanjutan, bukan hanya residu tradisi masa lalu. Temuan [Segara & Kuckreja \(2024\)](#) menegaskan bahwa stratifikasi sosial masih menjadi bagian integral dalam pembentukan identitas sosial masyarakat Bali, dengan adat dan institusi keagamaan memainkan peran sentral dalam mempertahankan struktur sosial yang ada. Penelitian ini mengindikasikan bahwa agama dan adat tidak hanya berfungsi sebagai sistem nilai, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mengatur distribusi status serta relasi antarkelompok. Namun demikian, kecenderungan literatur tersebut masih lebih banyak menempatkan stratifikasi sosial sebagai latar kultural, dan belum secara eksplisit membedah institusi keagamaan sebagai arena aktif reproduksi kuasa simbolik dalam praktik sosial sehari-hari.

Penelitian [Purana \(2022\)](#) menunjukkan adanya transformasi konsep *varna* menjadi praktik kasta berbasis genealogis. Pergeseran ini memperkuat diferensiasi status sosial dan berdampak pada akses individu terhadap sumber daya simbolik maupun peran keagamaan. Dalam perspektif sosiologi agama, fenomena ini mencerminkan proses institusionalisasi nilai religius menuju struktur sosial lokal, di mana ajaran yang secara normatif bersifat fungsional mengalami lokalisasi melalui adat dan sejarah sosial-politik Bali, hingga membentuk hierarki sosial yang relatif tertutup dan diwariskan. Penelitian lain seperti [Sintia \(2025\)](#) dan [Darsana et al. \(2015\)](#) menampilkan dinamika perubahan sikap masyarakat terhadap sistem kasta, terutama di kalangan generasi muda. Disini, meski sistem kasta masih diakui sebagai bagian dari struktur sosial desa adat dan praktik keagamaan, mulai muncul sikap kritis serta reinterpretasi terhadap legitimasi hierarki tersebut. Perbedaan persepsi menunjukkan bahwa struktur stratifikasi sosial tidak sepenuhnya statis, melainkan sedang dinegosiasikan ulang seiring dengan meningkatnya pendidikan, mobilitas sosial, dan keterbukaan terhadap nilai-nilai egalitarian.

Implikasi dalam studi tentang agama Hindu Bali perlu bergeser dari pendekatan deskriptif-harmonis menuju analisis relasional yang menempatkan praktik keagamaan sebagai bagian dari dinamika kekuasaan, negosiasi sosial, dan perubahan struktural. Dengan demikian, institusi keagamaan tidak dapat dipahami semata-mata hanya sebagai agen integrasi sosial, tetapi juga sebagai arena kontestasi antara pelestarian tradisi dan tuntutan kesetaraan sosial dalam masyarakat Bali kontemporer. Sejalan dengan implikasi tersebut, sejumlah kajian internasional *open-access* memberikan penguatan empiris bahwa praktik keagamaan Hindu di Bali dan Asia Selatan dapat dipahami sebagai arena relasional yang memuat dimensi kekuasaan simbolik. [Sihombing \(2022\)](#) menunjukkan bahwa meskipun sistem kasta tidak lagi secara eksplisit menentukan mobilitas sosial di Bali, hierarki sosial tetap terefleksi dalam praktik komunikasi sehari-hari. Hasil ini mengindikasikan bahwa stratifikasi sosial direproduksi tidak hanya melalui struktur adat dan institusi formal, tetapi juga melalui mekanisme mikro yang bersifat simbolik dan interaksional.

Pada level institusional dan ritual, [Ardhana \(2020\)](#) menegaskan bahwa praktik keagamaan Hindu Bali mengalami transformasi seiring dengan perubahan sosial yang lebih luas, termasuk relasi antara masyarakat, adat, dan tata kelola modern. Dengan ini, ritual tidak bersifat netral atau ahistoris, melainkan terikat pada konfigurasi sosial tertentu yang memungkinkan terjadinya reproduksi maupun pergeseran otoritas keagamaan. Penelitian [Nasution \(2022\)](#) juga menunjukkan bahwa praktik ritual di Bali melibatkan proses negosiasi legitimasi dan otoritas simbolik, terutama terkait peran pemimpin ritual dan penafsiran makna simbol keagamaan.

Stratifikasi Sosial sebagai Sumber Ketimpangan

Bagian ini membahas temuan empiris yang disajikan dalam subbab sebelumnya melalui pendekatan teoretis. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menilai ajaran normatif Hindu, melainkan untuk memahami praktik sosial yang terbentuk melalui institusionalisasi ajaran tersebut dalam konteks lokal. Berdasarkan temuan empiris mutakhir, stratifikasi sosial dalam masyarakat Hindu Bali masih beroperasi secara nyata dan sistemik melalui institusi keagamaan dan adat. Studi [Segara & Kuckreja \(2024\)](#) menegaskan bahwa struktur *wangsa* tetap menjadi rujukan penting dalam pembentukan identitas sosial serta distribusi peran keagamaan di tingkat desa adat. Hasil ini diperkuat oleh [Purana \(2022\)](#) yang menunjukkan bahwa praktik kasta berbasis genealogis secara langsung memengaruhi akses individu terhadap otoritas ritual dan posisi kepemimpinan adat. Dengan demikian, stratifikasi sosial tidak hanya hadir sebagai kategori simbolik, tetapi berfungsi sebagai mekanisme pengatur relasi kuasa dalam kehidupan religio-adat masyarakat Bali.

Penelitian [Ardika et al. \(2017\)](#) menunjukkan bahwa diferensiasi sosial di Bali telah terbentuk sejak periode prasejarah dan terus mengalami institusionalisasi melalui sistem kepercayaan, ritus, dan struktur sosial lokal. Meskipun konteks historisnya berbeda, temuan ini memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana hierarki sosial kemudian dilembagakan dan diwariskan, termasuk dalam praktik keagamaan Hindu Bali kontemporer. Dengan kata lain, ketimpangan yang tampak dalam institusi keagamaan saat ini merupakan kelanjutan dari proses historis panjang yang dilegitimasi secara kultural dan religius.

Dalam praktik keagamaan sehari-hari, stratifikasi sosial terartikulasi melalui pembagian peran ritual, pola komunikasi, serta mekanisme pengambilan keputusan adat yang bersifat selektif. Penentuan siapa yang berhak memimpin upacara, memberikan legitimasi ritual, atau menyuarakan pendapat dalam forum adat sering kali mengikuti garis keturunan dan status *wangsa*. Dengan ini ketimpangan sosial tidak selalu muncul dalam bentuk eksklusi formal, melainkan bekerja secara halus melalui normalisasi perbedaan peran dan otoritas dalam ruang-ruang sakral yang dianggap sah dan wajar oleh komunitas.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *symbolic power* dan *habitus* (Bourdieu, 1977). Struktur sosial yang dilembagakan melalui adat dan ritual keagamaan direproduksi secara berulang dan diterima sebagai tatanan yang natural serta memiliki legitimasi religius. Dalam kerangka ini, institusi keagamaan berfungsi sebagai arena distribusi modal simbolik yang memperkuat posisi kelompok dominan, sekaligus membatasi mobilitas sosial kelompok lain tanpa memerlukan mekanisme paksaan terbuka. Kekuasaan bekerja secara simbolik melalui pengakuan, legitimasi, dan internalisasi nilai-nilai hierarkis.

Jika Bourdieu menekankan mekanisme reproduksi kuasa simbolik melalui praktik sehari-hari, Dumont membantu menjelaskan kerangka kosmologis yang menopang legitimasi hierarki tersebut. Lebih jauh, transformasi konsep *varna* menjadi praktik kasta genealogis sebagaimana ditunjukkan oleh Purana (2022) sejalan dengan perspektif Dumont & Berreman (1971) tentang *homo hierarchicus*, di mana hierarki sosial dilegitimasi melalui simbol, ritus, dan kosmologi religius. Dalam konteks Bali, proses historis dan institusionalisasi adat ini menyebabkan ajaran yang secara normatif bersifat fungsional mengalami lokalisasi menjadi struktur sosial yang relatif tertutup. Konsekuensinya, stratifikasi sosial tidak hanya merefleksikan pembagian peran religius, tetapi juga mereproduksi ketimpangan akses terhadap otoritas simbolik, pengambilan keputusan adat, dan pengakuan sosial.

Pembahasan ini menegaskan bahwa institusi keagamaan Hindu Bali sudah berfungsi ganda, sebagai penjaga keteraturan sosial dan identitas budaya, sekaligus sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan sosial. Analisis ini memperlihatkan bahwa institusi keagamaan tidak hanya merefleksikan struktur sosial yang ada, tetapi juga berperan aktif dalam mereproduksi dan menegosiasikan relasi kuasa simbolik. Oleh karena itu, studi tentang agama Hindu Bali perlu bergerak melampaui pendekatan deskriptif-harmonis menuju analisis relasional yang menempatkan praktik keagamaan dalam dinamika kekuasaan, negosiasi sosial, dan perubahan struktural. Hasil ini akan relevan bagi kajian sosiologi agama yang lebih luas, khususnya dalam memahami bagaimana institusi keagamaan berfungsi sebagai arena negosiasi antara legitimasi simbolik dan tuntutan kesetaraan sosial.

Pelestarian Budaya Melalui Struktur Sosial Keagamaan

Stratifikasi sosial dalam institusi keagamaan Hindu Bali telah menjadi salah satu sumber utama ketimpangan sosial. Kajian-kajian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa institusi keagamaan Hindu Bali memiliki posisi sentral dalam pelestarian budaya sekaligus pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Studi-studi antropologis dan sosiologis menegaskan bahwa praktik keagamaan di Bali tidak dapat dipisahkan dari sistem adat dan struktur sosial yang mengatur partisipasi warga dalam ritual, distribusi peran religius, serta legitimasi simbolik yang menyertainya (Geertz, 1980; Lansing, 1991; MacRae, 2010). Ritual keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Ngaben, dan Odalan dipahami dalam literatur sebagai mekanisme utama pewarisan nilai budaya dan juga identitas kolektif yang berlangsung secara komunal dan lintas generasi.

Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pelestarian budaya melalui ritual keagamaan dapat berjalan beriringan dengan diferensiasi peran sosial yang relatif stabil. Beberapa studi mencatat bahwa akses terhadap posisi religius yang memiliki otoritas tinggi seperti *sulinggih* dan pemangku tidak sepenuhnya bersifat egaliter, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang keturunan, *wangsa*, dan legitimasi adat yang telah terinstitusionalisasi (Ayuningsasi & Sukadana, 2022; MacRae, 2010). Temuan ini memperlihatkan bahwa institusi keagamaan tidak hanya mentransmisikan nilai budaya, tetapi juga mereproduksi struktur sosial yang hierarkis. Literatur juga menempatkan pura sebagai ruang sosial yang memiliki fungsi regulatif selain fungsi spiritual. Studi-studi tentang praktik ritual di Bali menunjukkan bahwa pura berperan sebagai arena tempat nilai-nilai normatif didefinisikan dan ditegaskan melalui praktik berulang yang bersifat kolektif (Eiseman, 1990; Hobart, 2022). Namun, pengalaman partisipasi dalam ruang keagamaan tersebut bervariasi antarindividu, bergantung pada posisi sosial dan kedekatan mereka dengan struktur otoritas adat dan religius.

Peran desa adat atau desa pakraman dalam pelestarian budaya turut menjadi perhatian utama dalam kajian terdahulu. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *awig-awig* berfungsi sebagai instrumen pengaturan kehidupan sosial-keagamaan yang memastikan keberlangsungan praktik adat dan ritual (Nordholt, 2009; Parker, 2003b). Meskipun demikian, beberapa studi mencatat bahwa penerapan *awig-awig* cenderung mempertahankan batas-batas simbolik tertentu yang membedakan hak dan kewajiban warga berdasarkan posisi sosial dan keterikatan keturunan. Kajian mengenai generasi muda Bali memperlihatkan

adanya ketegangan antara komitmen terhadap pelestarian budaya dan penerimaan terhadap nilai kesetaraan sosial modern. Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda kerap mengalami ambivalensi dalam berpartisipasi institusi keagamaan, terutama ketika struktur adat dipersepsikan membatasi akses mereka terhadap peran sosial dan religius yang bermakna (Maulana & Putra, 2021; Subawa, 2022b; Suryani & Sugianingrat, 2021). Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan pelestarian budaya menghadapi tantangan internal yang tidak semata-mata bersumber dari globalisasi.

Ketegangan antara pelestarian budaya dan tuntutan kesetaraan sosial menjadi semakin menonjol dalam kajian tentang generasi muda. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa modernisasi tidak menghapus peran adat dan agama, tetapi memunculkan ruang negosiasi yang kompleks di dalamnya. Partisipasi generasi muda dalam institusi keagamaan sering kali bersifat selektif dan reflektif, mencerminkan upaya untuk tetap terhubung dengan identitas budaya tanpa sepenuhnya menerima struktur hierarkis yang menyertainya. Kerangka ini menjelaskan bahwa institusi keagamaan Hindu Bali dapat dipahami sebagai arena sosial yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia berperan penting dalam mempertahankan identitas budaya Bali di tengah arus perubahan global. Di sisi lain, ia turut mereproduksi ketimpangan simbolik yang berpotensi membatasi partisipasi inklusif. Sintesis literatur ini menegaskan bahwa tantangan pelestarian budaya ke depannya tidak hanya terletak pada keberlangsungan ritual dan simbol, tetapi juga pada kemampuan institusi keagamaan untuk merespons tuntutan keadilan sosial dan partisipasi yang lebih setara.

Dinamika Kontemporer: Antara Tradisi dan Perubahan Sosial

Dinamika kontemporer masyarakat Hindu Bali menunjukkan bahwa stratifikasi sosial berbasis *wangsa* tidak sekadar bertahan secara statis, tetapi mengalami proses negosiasi yang kompleks di tengah perubahan sosial. Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa sistem stratifikasi masih memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial dan praktik keagamaan masyarakat Bali, terutama melalui institusi adat dan keagamaan (Segara & Kuckreja, 2024). Keberlanjutan struktur tersebut kini dihadapkan pada tuntutan kesetaraan, partisipasi inklusif, dan rasionalitas modern yang semakin menguat, khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat urban.

Dalam ranah pemahaman keagamaan, muncul kecenderungan untuk membedakan secara lebih tegas antara konsep *varṇa* dalam ajaran Hindu normatif dan praktik kasta genealogis dalam kehidupan sosial. Purana (2022) menunjukkan bahwa pergeseran makna *varṇa* menjadi kasta berbasis keturunan telah menghasilkan ketimpangan sosial yang tidak sejalan dengan prinsip fungsional guna-karma. Kesadaran ini mendorong munculnya diskursus kritis yang menempatkan legitimasi religius tidak semata-mata pada status genealogis, melainkan pada kompetensi, pengabdian, dan kapasitas moral individu. Meskipun demikian, perubahan pada tataran wacana belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi struktural dalam institusi keagamaan dan adat.

Negosiasi antara tradisi dan perubahan sosial juga tampak dalam praktik relasi sosial, terutama dalam isu perkawinan lintas *wangsa*. Penelitian Sadnyini & Gorda (2021) menunjukkan bahwa meskipun modernisasi dan hukum nasional mendorong kesetaraan status individu, norma adat dan sanksi simbolik masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan penerimaan sosial terhadap perkawinan lintas kasta. Kejadian ini mengindikasikan bahwa tradisi tidak selalu bekerja melalui larangan formal, tetapi melalui mekanisme sosial yang lebih halus seperti reputasi keluarga, kehormatan simbolik, dan pengakuan komunitas. Dengan demikian, perubahan sosial tidak serta-merta menghapus struktur hierarkis, melainkan memaksa struktur tersebut beradaptasi secara gradual.

Perubahan juga terlihat pada bentuk otoritas simbolik dalam institusi keagamaan. Ayuningsasi & Sukadana (2022) mencatat adanya transformasi karakter sosial dan ekonomi rohaniawan Hindu (*sulinggih*), di mana legitimasi religius tidak hanya ditentukan oleh status *wangsa*, tetapi juga disebabkan oleh pendidikan, kemampuan komunikasi, dan jejaring sosial. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Sihombing (2022), pengaruh sistem kasta masih tetap signifikan dalam membentuk relasi sosial dan komunikasi budaya, meskipun tampil dalam bentuk yang lebih fleksibel dan tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Dinamika kontemporer masyarakat Hindu Bali dapat dipahami sebagai proses adaptasi bertahap yang berlangsung di dalam batas-batas institusi tradisional. Dalam kajian ini modernisasi, pendidikan, dan globalisasi tidak menghapus peran agama dan adat, tetapi mendorong terjadinya negosiasi simbolik mengenai makna otoritas, partisipasi, dan kesetaraan sosial (Subawa, 2022b). Dalam konteks ini ditegaskan kembali, institusi keagamaan Hindu Bali berfungsi secara ambivalen: di satu sisi sebagai penjaga kontinuitas tradisi dan identitas budaya, di sisi lain sebagai arena sosial tempat berlangsungnya perdebatan dan penyesuaian terhadap tuntutan perubahan sosial.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa stratifikasi sosial dalam masyarakat Hindu Bali tidak sekadar merupakan residu tradisi masa lalu, melainkan struktur sosial yang terus dilaksanakan dan dilegitimasi melalui institusi keagamaan dan adat. Melalui praktik ritual, pembagian peran religius, serta regulasi adat, institusi keagamaan berfungsi sebagai arena distribusi otoritas dan legitimasi simbolik yang menopang hierarki berbasis *wangsa*. Pada waktu yang sama, dinamika sosial kontemporer terutama peningkatan pendidikan, mobilitas sosial, dan keterlibatan generasi muda mulai memunculkan ruang negosiasi terhadap struktur sosial. Kajian ini menunjukkan bahwa negosiasi yang terjadi masih bersifat gradual dan simbolik, sehingga belum menghasilkan transformasi struktural yang signifikan. Hasil akhir, institusi keagamaan Hindu Bali beroperasi secara ambivalen: berperan penting dalam pelestarian identitas budaya dan kohesi sosial, sekaligus mereproduksi ketimpangan simbolik dalam kehidupan religio-adat.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sosiologi agama dengan menggeser fokus kajian yakni Hindu Bali dari pendekatan deskriptif-harmonis menuju analisis relasional yang menempatkan institusi keagamaan sebagai *locus* reproduksi dan negosiasi kekuasaan simbolik. Secara fungsi, temuan ini relevan bagi pengelolaan institusi adat dan keagamaan dalam menanggapi tuntutan partisipasi yang lebih inklusif tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena keseluruhan berbasis studi literatur, sehingga belum menangkap pengalaman subjektif masyarakat keagamaan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris seperti etnografi maupun wawancara secara mendalam, serta studi komparatif lintas daerah atau lintas agama, guna memperkaya pemahaman tentang relasi antara agama, stratifikasi sosial, dan perubahan sosial dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural.

Rujukan

- Abdulsyani, A. (2004). *Sosiologi Agama* (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Archer, M. S. (2007). *Making our Way through the World*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511618932>
- Ardhana, I. K. (2020). State and Society: Indigenous Practices in Ritual and Religious Activities of Bali Hinduism in Bali-Indonesia. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 3(1), 20–26. <https://doi.org/10.32795/ijiis.vol3.iss1.2020.681>
- Ardika, I. W., Setiawan, I. K., Srijaya, I. W., & Bawono, R. A. (2017). Stratifikasi sosial pada masa prasejarah di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 7(1), 33. <https://doi.org/10.24843/JKB.2017.v07.i01.p03>
- Ayuningsasi, A. A. K., & Sukadana, I. W. (2022). Perubahan Paradigma dalam Karakteristik Pribadi, Sosial, dan Ekonomi Rohaniawan Hindu (Sulinggih) di Bali. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 347–359. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1225>
- Bell, C. (1992). *Ritual Theory, Ritual Practice* (1st ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. In *The New Social Theory Reader* (1st ed, pp. 80–86). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-11>
- Bourdieu, P. (1991). Genesis and Structure of the Religious Field. *Comparative Social Research*, 13, 1–44.
- Chatterjee, P. (1993). *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Comaroff, J., & Comaroff, J. L. (1991). *Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa* (Vol. 1). Chicago: University of Chicago Press.
- Darsana, M. I. B., Holilulloh, H., & Yanzi, H. (2015). Persepsi masyarakat Bali terhadap sistem kasta dalam kehidupan sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 112–123.
- Dewi, S., Priastana, J., & Priyono, E. (2024). Dampak Sistem Kasta terhadap Struktur Sosial Umat Buddha di Bali. *Jurnal Dhammavicaya*, 8(1), 98–121.
- Dirks, N. B. (2001). *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Dumont, L., & Berreman, G. D. (1971). Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications. *Man*, 6(3), 515. <https://doi.org/10.2307/2799081>
- Eiseman, F. B. J. (1990). *Bali: Sekala and Niskala, Volume I: Essays on Religion, Ritual, and Art* (1st ed.). Singapore: Periplus Editions.

- Geertz, C. (1980). *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali* (First edit). Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York, NY: Basic Books.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford, CA: Stanford University Press. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1991.tb03368.x>
- Hobart, M. (Ed.). (2022). Introduction: Rethinking Bali and Balinese Studies. In *The Routledge Handbook of Balinese Studies* (1st ed., pp. 1–26). New York, NY: Routledge (AECT – Association for Educational Communications and Technology).
- Howe, L. (2004). *The Changing World of Bali: Religion, Society and Tourism*. New York, NY: Routledge (AECT – Association for Educational Communications and Technology).
- Lansing, J. S. (1991). *Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Landscape of Bali* (1st ed.). Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- MacRae, G. (2010). Contested space: Land, power and modernity in Bali. In M. Picard & A. (Eds. . Vickers (Eds.), *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture* (1st ed., pp. 115–136). Singapore: Archipelago Press.
- Maulana, I. P. A. P., & Putra, I. B. G. D. (2021). Metafora Konseptual Kasta dalam Masyarakat Bali: Kajian Linguistik Kognitif. *PRASI*, 16(02), 92. <https://doi.org/10.23887/prasi.v16i02.37578>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, N. (2022). Bhairawa Puja Ritual Practice in Pujungan Bali. *Paramita: Historical Studies Journal*, 32(1). <https://doi.org/10.15294/paramita.v32i1.22580>
- Nordholt, H. S. (2009). *Bali: Colonialism and the Making of the Modern State in Indonesia* (Reprint). Leiden: KITLV Press.
- Parker, L. (2003a). *From Subjects to Citizens: Balinese Villagers in the Indonesian Nation-State* (1st ed.). Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies (NIAS Press).
- Parker, L. (2003b). From Subjects to Citizens. In *From Subjects to Citizens: Balinese Villagers in the Indonesian Nation-State*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203484678>
- Picard, M. (2006). *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture* (First Engl). Singapore: Archipelago Press.
- Purana, I. M. (2022). Study Of Critical Disadvantages System Catur Varna To Concept Catur Kasta In Civil Society Bali Hindu. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 5(1), 20–27. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v5i1.1524>
- Robinson, G. (2009). *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali* (Paperback). Ithaca & London.
- Sadnyini, I. A.. (2021). Social Changes of Traditional Rules in Facing Contemporary Developments: A Sociological Study of Intercaste Marriage in Balinese Society. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(1964), 79–83. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.11>
- Segara, I. N. Y., & Kuckreja, R. (2024). The Social Stratification System in Forming a Balinese Identity. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.24843/JKB.2024.v14.i01.p01>
- Sihombing, L. H. (2022). The Significance of the Caste System of Balinese in the Modern Era: A Discourse of Cultural Communication. *Komunitas*, 14(2), 146–156. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i2.35985>
- Sintia, N. K. (2025). Perspektif remaja Hindu terhadap ajaran Catur Varna dan sistem kasta pada zaman modern di Desa Sukamaju. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 8(1), 43–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/swjsa.v8i1.1386>
- Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat Dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali. *Dharma Duta*, 18(1), 21–32. <https://doi.org/10.33363/dd.v18i1.446>
- Subawa, I. B. G. (2024). Agama Hindu dan Budaya Bali: Warisan Luhur dalam Kehidupan Modern. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(4), 104–113. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i4.3805>
- Subawa, I. M. P. (2022a). The Meaning of Social Construction Hindu Community Exogamy Marriage In Bali. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 6(1), 118–123. <https://doi.org/10.25078/vidyottama.v6i1.658>
- Subawa, I. M. P. (2022b). Young Generation Attitudes toward Caste System in Bali. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(4), 372–385. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i4.3805>
- Suryani, N. K., & Sugianingrat, I. A. P. W. (2021). Student E-Learning Satisfaction During The Covid-19 Pandemic in Bali, Indonesia. *Jurnal Economia*, 17(1), 141–151. <https://doi.org/10.21831/economia.v17i1.33196>
- Turner, V. (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Vickers, A. (2012). *Bali: A Paradise Created* (2nd ed.). Tokyo; Rutland, VT; Singapore: Tuttle Publishing.
- Wiana, K., & Santeri, R. (1993). *Kasta dalam Hindu: Kesalahpahaman Berabad-abad*. Yayasan Dharma Naradha.

Yogiswari, K. S., Maharani, S. D., & Nugroho, H. W. (2025). Diskursus Nilai Kesakralan Perkawinan Hindu dan Fenomena Sosial Sing Beling Sing Nganten Pada Masyarakat Perkotaan di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(2), 196–215. <https://doi.org/10.37329/jpah.v9i2.3612>